

PERAN STRUKTUR SOSIAL-EKONOMI DAN TOKOH AGAMA DALAM COLLECTIVE EFFICACY KOMUNITAS

THE ROLE OF SOCIAL-ECONOMY STRUCTURE AND RELIGIOUS LEADER IN COLLECTIVE EFFICACY COMMUNITY

Davy Hendri

(Universitas Islam Negeri Imam Bonjol,
Balai Gadang, Koto Tengah, Padang, Indonesia;
email: davyhendri74@gmail.com)

Naskah Diterima: 29 April 2015, direvisi: 12 Oktober 2015,
disetujui: 10 Desember 2015

Abstract

Reducing citizen's anti-social behaviour has become a major problem that must be faced by governments in various countries of the world, including Indonesia, since the past few days. The establishment of collective efficacy is intended as an overview of community capacity to enforce the social regulation in order to achieve citizen participation in activities (collective action) should be one of the goals of anti-social behaviour prevention policies. In the socio-economic structure are very heterogeneous community, realizing it is becoming a big challenge. This article examines the relationship between socio-economic structure (SES) of the community with the creation of collective efficacy. In contrast to some studies on the same theme, this paper raises the quality of the influence of religious leaders as a construct of collective efficacy. In this context, harmony and enforcement of common rules is a form of collective efficacy can be initiated by religious leaders (ulama) as informal leaders at the community level itself. Furthermore, continued with the analysis of the impact of collective efficacy in the community against efforts to create public goods such as security through collective action, by and at the level of the community itself. Analyses were performed using socio-economic data analysis unit based community with about 400 districts /cities of 33 provinces in Indonesia in cross-section in 2011. This study found that the socio-economic structure of stable communities, especially in determining the formation of collective efficacy and quality and local leaders, especially religious leaders turned out to encourage collective action play an important role in the prevention of anti-social behaviour.

Keywords: social-economy structures, religious leaders, anti-social behaviour, collective action, collective efficacy community.

Abstrak

Mengurangi perilaku anti-sosial warga telah menjadi masalah besar yang harus dihadapi pemerintah di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia sejak beberapa waktu terakhir. Pembentukan *collective efficacy* yang dimaksudkan sebagai gambaran kapasitas masyarakat dalam menegakkan regulasi sosial dalam rangka mewujudkan partisipasi warga berupa kegiatan bersama (*collective action*) seharusnya menjadi salah satu tujuan kebijakan pencegahan perilaku anti-sosial termasuk kriminalitas lokal. Namun, dalam struktur sosial-ekonomi komunitas yang sangat heterogen, mewujudkan hal ini menjadi sebuah tantangan besar. Artikel ini menguji hubungan antara struktur sosial-ekonomi dengan penciptaan *collective efficacy*. Berbeda dengan beberapa penelitian setema, paper ini memunculkan kualitas pengaruh tokoh agama sebagai konstruk dari *collective efficacy*. Dalam konteks ini, keharmonisan dan penegakan aturan bersama yang merupakan wujud dari *collective efficacy* dapat diinisiasi oleh tokoh agama sebagai pemimpin informal di level komunitas itu sendiri. Analisis dilakukan dengan menggunakan data sosial-ekonomi dengan unit analisis komunitas berbasis sekitar 400 kabupaten/kota dari 33 provinsi se-Indonesia secara *cross-section* pada tahun 2011. Penelitian ini menemukan fakta bahwa struktur sosial-ekonomi komunitas yang stabil amat menentukan pembentukan *collective efficacy* dan pemimpin lokal berkualitas terutama tokoh agama ternyata berperan penting mendorong menciptakan *collective efficacy* pada level komunitas.

Kata kunci: struktur sosial-ekonomi, tokoh agama, perilaku anti-sosial, aksi kolektif, komunitas efektif kolektif

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku anti-sosial, mulai dari kenakalan remaja, tawuran massal antar desa/kampung sampai kriminalitas menjadi masalah yang paling mendesak yang dihadapi oleh berbagai negara dewasa ini. Terkait kriminalitas, sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1999 menyatakan bahwa kriminalitas telah menyedot dana pembayar pajak di Amerika Serikat

sekitar USD300 miliar sampai dengan USD1 triliun setiap tahunnya¹. Bank Dunia bahkan mendorong berbagai pendekatan multi sektor termasuk strategi berbasis masyarakat untuk memecahkan masalah pelik ini. Pada intinya, strategi ini berupa kebijakan mendorong partisipasi setiap pribadi warga dalam upaya proteksi bersama terhadap berbagai resiko

¹ D. A. Anderson, "The Aggregate Burden of Crime", *Journal of Law and Economics*, 42(2), 1999, pp. 611-642.

seperti terpapar kriminalitas.² Partisipasi bisa muncul dalam bentuk kontribusi moneter (iuran) dan non-moneter (waktu dan bentuk lainnya) guna penyediaan fasilitas fisik dan non-fisik sehingga tercipta *security (public good)* di level komunitas (*private provision of public good*).

Masalahnya, dalam struktur sosial-ekonomi komunitas yang sangat heterogen, mewujudkan hal ini menjadi sebuah tantangan besar. Keputusan individu untuk turut berpartisipasi dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan tempat tinggalnya (*neighbourhood effect*). Warga akan memiliki kemauan untuk melakukan intervensi untuk kebaikan bersama jika mereka berbagi rasa saling percaya dan solidaritas. Ini berarti jika warga yang tinggal di satu kawasan, saling percaya, mereka akan bersedia siap untuk memberi bantuan satu sama lain dalam beragam hal bahkan dalam kasus bahaya atau situasi yang tidak menyenangkan dan darurat.

Dalam konteks ini, kesediaan untuk campur tangan adalah hal pokok. Sementara itu kepercayaan serta solidaritas merupakan fungsional karena keberadaan unsur ini cenderung untuk meningkatkan kesediaan warga untuk campur tangan. Kesediaan warga demi kebaikan bersama merupakan bentuk kontrol sosial informal. Hal ini secara spesifik diperkenalkan melalui teori *collective efficacy* oleh Sampson dan Raudenbush.³ Mereka mendefinisikan *collective efficacy* sebagai hubungan kohesi dan saling percaya dengan harapan bersama untuk melakukan intervensi dalam mendukung kontrol sosial informal terhadap lingkungan.

Kontrol sosial informal, dalam hal luas, adalah kapasitas masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama anggotanya dan mengatur perilaku mereka sesuai dengan norma-norma yang diinginkan dan didirikan serta melindungi umum kesejahteraan masyarakat. Pada aspek keamanan, salah satu tujuan utama dari warga masyarakat adalah bertempat tinggal di lingkungan yang aman dan tertib serta bebas dari berbagai aksi kejahatan para predator, terutama dalam bentuk kekerasan interpersonal. Pada level komunitas, konsep kontrol sosial informal

meliputi kemauan dan tindakan warga untuk campur tangan atas nama komunitas mereka, melindunginya dari unsur-unsur predator, dan memobilisasi sumber daya dan mencari intervensi eksternal dan kelembagaan untuk mencapai tujuan keamanan dan ketertiban dalam komunitas.

Sebagai sebuah *output* (produk), kekuatan kontrol sosial informal akan berfluktuasi secara dinamis. Kontrol sosial akan bertambah kuat jika semakin banyak warga yang mendukung hal ini. Sebaliknya, kekuatan kontrol sosial akan berkurang jika anggota komunitas lebih sedikit yang bersedia untuk campur tangan dan berpartisipasi. Hal ini dijelaskan melalui 2 (dua) mekanisme. *Pertama*, manfaat dari kontrol sosial dalam bentuk keputusan untuk intervensi melibatkan resiko baik secara riil maupun resiko yang dirasakan. Pengambilan keputusan dapat menjadi proses yang kompleks yang melibatkan beberapa faktor termasuk utilitas yang diharapkan. Warga cenderung menghitung biaya yang dirasakan dan manfaat dari keputusan intervensi mereka. Perhitungan biaya manfaat mereka sebagian besar akan dipengaruhi oleh resiko dan manfaat dari tindakan intervensi yang dirasakan. Selain insentif sosial berupa dukungan penuh oleh komunitas, dalam perspektif *cost-benefit* semakin besar dukungan komunitas komunitas akan semakin menurunkan *cost*⁴ yang ditanggung oleh setiap individu untuk menegakkan sanksi sosial tadi. *Kedua*, kepercayaan di antara tetangga dan juga percaya pada kapasitas mekanisme kontrol sosial formal dalam memberikan dukungan, merupakan faktor penting lainnya yang berperan dalam pengambilan keputusan. Persepsi individu bahwa kurang/tiadanya intervensi mungkin akan lebih memperburuk masalah akan memotivasi mereka untuk campur tangan. Jika anggota dari lingkungan yakin bahwa dia akan mendapatkan dukungan dari anggota masyarakat dalam kasus munculnya bahaya yang menyusul intervensi, maka ia akan lebih percaya diri dalam melakukan intervensi. Demikian pula, kepercayaan terhadap kapasitas dan kehadiran kontrol sosial formal dalam masyarakat juga akan mempengaruhi keputusan intervensi dengan cara yang positif.

B. Perumusan Masalah

Lebih jauh, kontrol sosial juga tidak akan terwujud tanpa adanya kepercayaan kepada mekanisme dan berbagai aturan (norma) yang ada. Norma yang disepakati oleh suatu komunitas akan menjadi panduan bagi setiap individu warga

² Elinor Ostrom, "Collective Actions and The Evolution of Social Norms", *Journal of Economics Perspectives*, Vol. 14 No. 3, 2000, pp. 137-158

³ Sampson menarik analogi antara efikasi pribadi (*self-efficacy*) dan kolektif (*collective efficacy*) yang pada awalnya dikembangkan oleh Bandura, karena keduanya disebut sebagai kapasitas menghasilkan efek yang dimaksudkan. Jika *self-efficacy* dari Albert Bandura adalah keyakinan seseorang pada kemampuannya untuk berhasil dalam situasi tertentu, *collective efficacy* Sampson et al. (1997) adalah kapasitas atau kepercayaan dari masyarakat untuk berhasil dalam memproduksi kontrol sosial dan mengurangi kejahatan dan gangguan.

⁴ Penegakan kontrol sosial mensyaratkan adanya interaksi yang intens antar individu. Sebagaimana konsep produksi, jika perusahaan mencapai skala ekonomi, dia bisa menghasilkan output dengan biaya input yang semakin menurun (*diminishing marginal cost*).

anggota komunitas tersebut dalam berperilaku dan saling berinteraksi sesama mereka. Selain mengatur apa yang boleh dan tidak dilakukan, norma sosial juga mencakup bentuk penilaian sampai kepada penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) atas perilaku individu anggota komunitas tersebut.

Menariknya, norma sosial akan berkembang dan beradaptasi sepanjang waktu melalui interaksi antar generasi. Untuk alasan itu, level kontrol sosial juga akan berbeda antar komunitas, antar budaya dan antar waktu. Hal ini memberikan beberapa implikasi penting kepada variasi dampak peranan norma sosial dalam pencegahan pelanggaran norma atau kegiatan anti-sosial lain secara umum. Dalam hal ini, pada beberapa struktur komunitas, melalui mekanisme yang berbeda, norma sosial tidak berperan secara optimal. Merujuk kepada *social disorganization theory*⁵, pada komunitas yang heterogen dalam budaya dan etnis, kompetisi antar standar norma sosial menyebabkan komunitas gagal dalam menyepakati kontrol sosial⁶. Dalam konteks Indonesia yang kaya dengan keragaman etnis, ketimpangan *income* yang makin melebar dan laju urbanisasi yang meningkat pesat serta eksisnya dualisme perekonomian, bauran kondisi di atas tentu menimbulkan variasi peranan norma sosial yang diharapkan bisa menjadi kandidat *deterrence effect* kriminalitas dalam komunitas tertentu.

Mekanisme transmisi peranan sosial lingkungan terhadap *Collective Action (CA)* guna mengurangi kriminalitas di level komunitas sudah diperdebatkan sejak lama. Mancur Olson dalam karya *magnum opus*nya menyatakan bahwa *rational, self-interested individual will act to achieve their common or groups interests*.⁷ Dalam konteks berbeda, tingkat partisipasi

individu dalam sebuah CA bersifat ambigu.⁸ Secara spesifik Bergstrom menyatakan bahwa ada *threshold* bagi *private* pribadi dalam mendistribusikan kekayaannya secara sukarela demi penciptaan *public good*.⁹ Hal ini amat ditentukan oleh dinamika posisi dan status kesejahteraannya dalam komunitas itu. Terkait hal ini, ketimpangan *income* yang tinggi pada komunitas tertentu bisa menjadi insentif (positif) atau disinsentif (negatif) kontribusi moneter pribadi warga.¹⁰

C. Tujuan

Studi ini bertujuan memaparkan konsep *collective efficacy* (CE) dan keterkaitannya dengan kegiatan pencegahan kriminalitas berbasis masyarakat (*collective action-CA*). Teori ini berpendapat bahwa level CE masyarakat yang tinggi akan melemahkan efek merugikan dari ketimpangan struktural terhadap tingkat kriminalitas. Paper ini akan mengeksplorasi sumber dan bagaimana CE ini terbentuk dalam sebuah komunitas. Paper ini menjadikan pengaruh tokoh informal dalam hal ini khusus merujuk kepada peran tokoh agama sebagai konstruk dari konsep CE. Secara spesifik, paper ini bertujuan untuk:

1. Membentuk konstruk dan besaran *collective efficacy* komunitas.
2. Mengestimasi bagaimana dampak struktur sosial ekonomi terhadap level CE komunitas.
3. Mengestimasi variasi *collective efficacy* komunitas berdasarkan perbedaan region, Jawa-Luar Jawa.

D. Kerangka pemikiran

Trust adalah syarat penting bagi performa efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Di tengah ketidaksempurnaan informasi, mahalnya biaya penegakan hukum, atau kegagalan koordinasi, *trust* bisa mengatasi kegagalan pasar dan menghasilkan capaian yang mungkin tidak akan diraih dengan cara lain.¹¹ Di sisi empiris, *trust* ditemukan terkait dengan berkurangnya korupsi dan penciptaan birokrasi yang lebih efektif (La Porta et al., 1997),

⁵ Clifford R. Shaw, and Henry D. McKay, *Juvenile delinquency and urban areas*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1972.

⁶ Teori ini merupakan pengembangan *differential association process theory* yang diperkenalkan oleh sosiolog Chicago University, Edwin Sutherland pada 1947. Teori ini menyatakan bahwa konflik antar norma merupakan akar dari kriminalitas. Pada level individu, individu mengalami proses interaksi dan pembelajaran sosial lebih banyak dengan kelompok yang intim dengannya. Jika kelompok intim dalam masyarakat tersebut terlibat (melawan) kriminalitas maka dia juga akan menjadi kriminal (anti-kriminal). Konsep ini dilengkapi dengan *differential social organizations theory*, di mana Sutherland menyatakan bahwa dalam komunitas yang sudah terdiferensiasi, kriminalitas akan meningkat jika kelompok yang cenderung terlibat kriminalitas memenangkan kompetisi norma karena relatif lebih mendominasi. Berbeda dengan *control theory* (Hirschik), teori ini lebih menekankan bahwa potensi kriminalitas individu berkembang seiring interaksi yang dinamis, struktur sosial dan pilihan kelompok interaksi.

⁷ Mancur Olson, *The Logic of Collective Action: Public Goods and The Theory of Groups*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965.

⁸ Alberto Alesina and Eliana La Ferrara, "Participation in Heterogeneous Communities", *Quarterly Journal of Economics* 115(3), 2000, pp. 847-904.

⁹ Theodore Bergstrom, Lawrence Blume and Hal Varian, "On The Private Provision of The Public Goods", *Journal of Public Economics*, Vol.29, 1986, pp. 25-49

¹⁰ Eliana La Ferrara, "Inequality and Participation : Theory and Evidence from Rural Tanzania", *Journal of Public Economics*, vol. 85(2), 2002, pp. 235-273

¹¹ Nan Lin, *Building a network theory of social capital* in N. Lin, K. Cook et al. (eds.) *Social Capital. Theory and Research*, New York: Walter de Gruyter, 2001.

pengembangan sektor keuangan (Guiso et al., 2004) dan juga pembangunan ekonomi yang lebih tinggi (Knack dan Keefer, 1997; Zak dan Knack, 2001). Peneliti sosial semakin menggunakan *trust* untuk menjelaskan berbagai tingkat kerjasama dalam berbagai lingkungan sosial dan politik yang berbeda-beda. Agar orang-orang bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka, mereka tidak perlu hanya mengenal satu sama lain, tetapi juga saling percaya sehingga mereka tidak akan mengeksploitasi dalam hubungan mereka, dan mengharapkan benar-benar memperoleh manfaat dari kerja sama mereka (Field, 2003).

Menurut literatur, korelasi ini didorong oleh tiga faktor utama. Pertama, prinsip *homophily* (McPherson et al. 2001) dan resistensi atas heterogenitas.¹² Dari perspektif ini, kesenjangan ekonomi merupakan sumber keragaman dan jarak sosial-ekonomi. Semakin tinggi tingkat ketimpangan ekonomi, semakin tinggi “hambatan sosial” antara kelompok-kelompok yang berbeda dan individu sehingga mereka merasa kurang akrab dengan dan terhubung ke orang lain. Hal ini, pada gilirannya, menghambat pembentukan kepercayaan. Kedua, berkaitan dengan konsep keadilan. Ketimpangan dapat menghasilkan persepsi ketidakadilan dan keyakinan bahwa orang lain memiliki kelebihan yang diperoleh secara tidak adil, sehingga menghambat perkembangan kepercayaan terhadap orang lain. Ketiga mengacu pada hipotesis konflik sumber daya. Yaitu, masyarakat yang timpang, mungkin tidak bersepakat atas bagaimana berbagi (dan membiayai) barang publik (*public goods*). Konflik ini, pada gilirannya, memecah ikatan sosial dan mengurangi pembentukan kepercayaan dan kohesi sosial.

1. *Trust* dan *Inequality*

Banyak ilmuwan sosial berusaha untuk memahami faktor-faktor penentu *trust* dan mengapa hal itu sangat bervariasi di seluruh negara. Sebagian besar penelitian ini telah difokuskan pada hubungan antara *trust* dan ketimpangan pendapatan (dan ukuran lain dari heterogenitas seperti *fractionalisation* etnis atau agama) dan mencapai kesimpulan umum bahwa ada korelasi negatif yang kuat antara ketimpangan dengan kepercayaan umum (*general trust*).

Pada dasarnya setiap individu mendapatkan *utility* dari mengkonsumsi barang untuk pribadi dan tambahan *utility* dari *public good* sebagai konsekuensi dari posisinya dalam interaksi sosial. Misalkan sekelompok individu secara seragam terdistribusi dalam rentang $[0,1]$ dan dirangking berdasarkan status kekayaannya y_i , sehingga yang termiskin

memiliki indeks 0 dan terkaya memiliki indeks 1. Dimisalkan distribusi awal kekayaan sebagai $\{y_i\}$. Misalkan H adalah set individu yang bergabung ke dalam grup. Setiap individu bebas memutuskan untuk bergabung dengan sebuah grup yang menyediakan *excludable good* kepada setiap anggotanya. Barang ini dikonsumsi dalam kuantitas yang sama oleh dan hanya untuk anggota tiap grup. Total upaya dan konsekuensi biaya untuk menyediakan barang diasumsikan tetap dan sama dengan C . Biaya ditutup dari pajak yang dikenakan kepada individu anggota grup dengan sistim proporsional atas kekayaan ty_i , yang diasumsikan *eksogen* dan hak akses diatur sedemikian rupa sehingga diasumsikan tidak ada masalah *free-rider*.

$$C = \int_{i \in H} ty_i di \dots\dots\dots(1)$$

Ekuilibrium grup akan dibentuk oleh individu miskin $[0, h^*]$. Hanya dengan melihat perubahan *inequality* yang dihasilkan oleh penambahan jumlah anggota maka *ekuilibrium* baru terjawab. Perubahan *inequality* akan mempengaruhi status distribusi kekayaan kelompok \hat{I} , apakah sama saja distribusinya dengan awal, makin kaya $[\hat{I}, 1]$ atau makin miskin $[0, \hat{I}]$. Selanjutnya akan dibahas *ekuilibrium* yang terjadi jika terjadi perubahan *inequality* dalam grup.

1. Anggota yang baru relatif ternyata lebih kaya $[h^*, 1]$ dari *threshold* yang ditetapkan $\bar{Y}_{h^*} > y_{h^*}$, distribusi kekayaan semakin tertarik ke atas. Namun hal ini menjadi ambigu, karena anggota baru tadi menjadi relatif lebih kaya sementara yang lain menjadi relatif lebih miskin. Anggota baru yang lebih kaya akan memilih untuk tidak jadi bergabung ke dalam grup.
2. anggota yang baru relatif ternyata lebih miskin $[0, h^*]$ dari *threshold* yang ditetapkan $\bar{Y}_{h^*} < y_{h^*}$, distribusi kekayaan semakin tertarik ke bawah sehingga *cost* aktivitas grup akan semakin berat ditanggung anggota yang lebih kaya (yang berada di atas *threshold*). Hal ini menyebabkan yang relatif lebih miskin akan lebih mendapat *benefit* dan bertambah banyak jumlahnya dengan bergabung di dalam grup daripada si kaya. Komposisi grup akan lebih banyak diisi oleh yang miskin dan distribusi kekayaan akan berada di level bawah daripada sebelumnya.

Jadi kesimpulannya, dampak dari meningkatnya *inequality* terhadap partisipasi dalam grup adalah ambigu. Hal ditentukan oleh perubahan pola distribusi (redistribusi) kekayaan yang terjadi setelah anggota baru bergabung. Dampaknya akan *negatif* jika redistribusi tadi menyebabkan semakin memburuknya *inequality* pada bagian terbawah

¹² Alberto Alesina and Eliana La Ferrara, Op. Cit.

dari anggota grup. Dampaknya akan *positif* jika redistribusi tadi menguntungkan sedikit bagi (tergantung penurunan *tax rate* yang diperolehnya) orang kaya di atas banyak orang miskin sehingga akan meringankan *inequality* pada bagian terbawah dari anggota grup.

2. Trust dan Kepemimpinan

Chong percaya bahwa peserta aksi CA berbasis publik juga menerima “insentif selektif” untuk bekerja sama, di saat non-kooperator tidak akan menerimanya. Namun insentif ini didasarkan pada tekanan sosial dan tidak melulu terkait besaran moneter. Kedua, dalam konteks sebuah kelompok, motivasi untuk melakukan CA terjadi dalam situasi interaksi berulang, sehingga akan ada insentif sosial seperti keinginan untuk mendapatkan atau mempertahankan persahabatan, menjaga status sosial seseorang dan menghindari cemoohan atau pengucilan.¹³

Singkatnya, partisipasi mengamankan insentif selektif berupa reputasi yang baik. Menurut Chong (1991) reputasi adalah tujuan intrinsik individu karena mereka berusaha untuk membangun dan memelihara identitas sosial tertentu, bagaimana mereka terlihat di mata orang lain. Mempertahankan reputasi, oleh karena itu menjadi insentif untuk berpartisipasi, sedangkan potensi kerugian reputasi menjadi sanksi. Chong juga menyatakan bahwa ada orang-orang yang benar-benar berkomitmen, kooperator tanpa syarat (*unconditional cooperator*), yang berkontribusi terhadap gerakan, terlepas dari keterlibatan atau investasi lain. Orang tersebut, didorong oleh kombinasi *altruisme* (kesenangan yang diperoleh dari membahagiakan orang lain), dan moral yang kuat (kebenaran yang tidak perlu meningkatkan kesenangan atau kesejahteraan) serta komitmen.

Selain itu, kooperator tanpa syarat yang termotivasi, berperan penting dalam mempromosikan kerjasama. Mereka membuka jalan untuk kooperator bersyarat (*conditional cooperator*), mereka yang berpartisipasi bergantung pada kontribusi orang lain untuk terlibat.¹⁴ Teori peran kooperator tanpa syarat dapat ditemukan dalam pembahasan kepemimpinan dalam berbagai bidang termasuk manajemen, dan pendidikan.¹⁵ Dalam manajemen istilah pemimpin transformasional digunakan untuk mengklasifikasikan orang-orang

yang mau dan mampu memotivasi orang lain untuk bergabung dengan gerakan dengan standar tertentu dan sebaliknya menginspirasi pengikutnya.

Hal ini menjadi sebuah tantangan terhadap gagasan bahwa pertimbangan rasional sebagai satu-satunya motivasi untuk terlibat dalam tindakan kontrol sosial. Oleh karena individu mungkin juga didorong oleh insentif sosial termasuk menjaga reputasi mereka atau dengan kepentingan *altruistik*. *Kedua*, dorongan CA bisa datang dari pemimpin teladan yang oleh karena pengorbanan pribadi, komitmen yang kuat akan menarik dan menjadi pemberi motivasi dan sanksi bagi orang lain untuk mengikutinya. *Ketiga*, kooperator bersyarat atau pengikut, massa kritis dalam gerakan sosial, memperoleh insentif dari sistem tata nilai mereka sendiri dan juga oleh sistem penghargaan dan sanksi yang terkait dengan kepentingan reputasi mereka.

E. Metode Penelitian

Studi ini merupakan studi dengan menggunakan data sekunder dari beberapa survey BPS pada tahun 2011, terkait indikator sosial-ekonomi pada level individu dan komunitas level desa/kelurahan. Namun dikarenakan keterbatasan representasi (sampel) data pada kedua level tersebut untuk bisa dijadikan ukuran heterogenitas *income* yang relevan yang akan digunakan untuk menguji hubungan antara peran struktur (identitas) sosial ekonomi terhadap pembentukan konstruk CE maka pada akhirnya studi ini merujuk komunitas pada level kabupaten/kota dengan metode agregasi yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

1. Data dan Variabel

Studi ini menggabungkan data level individu pada modul aspek penghasilan SUSENAS 2011 dan data peranan informal *leader* pada level desa/kelurahan dari PODES 2011 serta berbagai data rerepresentasi nasional lainnya. Kedua level data ini diaggregasi kepada level kabupaten/kota sesuai maksud dan cakupan studi. Jadi studi ini mencakup data *cross-section* dengan unit analisis 480 kabupaten/kota se-Indonesia. Proses agregasi dilakukan dalam dua (2) tahap. Pertama, menambahkan data pada tingkat individu dan rumah tangga, baik dalam numerik dan biner ke tingkat masyarakat. Kedua, diikuti dengan membuat proporsi (rasio) dengan membagi angka ini dengan jumlah desa di tingkat kecamatan/kota.

2. Pengukuran CE

Pada tahap pertama, studi ini akan menentukan level CE. Memang data yang dimiliki tidak memiliki variabel yang secara langsung mengungkapkan fakta ini. Namun, kuisisioner PODES 2011 memiliki variabel

¹³ Denis Chong, *Collective Action and The Civil Right Movement*. Chicago: University of Chicago Press, 1991, pp. 9.

¹⁴ Elinor Ostrom, Op.Cit.

¹⁵ Alin Halimatussadiyah, “Social Capital to Streghten Collective Environmental Action in Indonesia”, Disertasi Doktoral tidak dipublikasikan, Depok: Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2013.

yang dapat digunakan sebagai proksi sesuai konsep CE, yaitu variabel r1302a tentang tawuran massal yang bisa didamaikan di suatu desa¹⁶. Variabel CE dibangun dengan menggunakan data desa yang mengalami tawuran massal sebagai unit pengukuran, di mana di desa itu:

- 1 = tawuran massal dapat didamaikan
- 0 = tawuran massal tidak dapat didamaikan

Selain itu, ada r1302b variabel, yang berisi pertanyaan tentang peran masing-masing tokoh/aparat dalam menjadi insiator perdamaian atau mendamaikan tawuran massal, mulai dari aparat keamanan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya. Dalam hal ini, terkait peran norma sosial, maka hanya jawaban 4 yang diperhitungkan dalam analisis ini. Jika 4 berarti hanya menganalisis peran tokoh agama (toga) yang akan menjadi dasar dari proksi variabel CE.

- 1 = jika r1302b tawuran massal bisa didamaikan oleh toga
- 0 = lainnya

Jadi desa di mana perkelahian massal bisa didamaikan oleh tokoh agama (interaksi dua variabel, yaitu r1302a dan r1302b), menjadi konstruk CE.

- 1 = r1302a * r1302b
- 0 = lainnya

Pada tahap kedua, estimasi level CE. Sebagaimana telah dipaparkan sekilas di awal, level CE ditentukan melalui proses agregasi data PODES tadi kepada level kabupaten/kota. Agregasi didekati dengan mengambil nilai rata-rata dari yang diprosikan dari interaksi kedua variabel di atas dalam skala positif. Secara operasional, tokoh agama disebut berpengaruh jika mereka berhasil memediasi perkelahian massal di level komunitasnya. Jadi selanjutnya, jika semakin banyak desa pada suatu kabupaten/kota yang tawuran

Tabel 1. Agregasi Karakteristik Desa/Kelurahan pada level Kabupaten/Kota

Karakteristik Desa (data PODES)	Rasio Level Kab/Kota	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Tokoh informal mendamaikan (1 = Ya; 0 = Tidak)	tokoh	502	0.003	0.007	0.00005	0.07
Tokoh agama mendamaikan (1 = Ya; 0 = Tidak)	toga	502	0.001	0.005	0	0.07
Tokoh msyrkat mendamaikan (1 = Ya; 0 = Tidak)	toma	502	0.000077	0.0005	0	0.006
Lemosos ada dan aktif (1 = Ya; 0 = Tidak)	lemosos	502	0.016	0.0278	0.0001	0.16
Lemasy ada dan aktif (1 = Ya; 0 = Tidak)	lemasy	502	0.039	0.0482	0.0002	0.35
Memiliki bdn perwkn desa (1 = Ya; 0 = Tidak)	bpd	502	0.002	0.003	0.0005	0.014
Melakukan kerja bakti (1 = Ya; 0 = Tidak)	Kerja_bak	502	0.13	0.075	0.003	0.5
Perkelahian massal di desa dgn etnis>1 didamaikan (1 = Ya; 0 = Tidak)	desakonf	502	0.001	0.004	0	0.06
Kabupaten/Kota (data SUSENAS)						
gini2011	gini	502	0.326	0.048	0.184	0.478
gini2010	gini2010	502	0.284	0.045	0.187	0.461
polarisasi	polarisasi	502	0.287	0.069	0.093	0.552
Rerata pengeluaran per kapita (mean_In) RT	Inmean	502	13.28	0.328	12.19	14.26
Penduduk usia 0-7 thn	anak	502	0.005	0.005	0.0005	0.072
Penduduk Perkotaan	Urbrate	502	0.398	0.316	0.008	1
RT dikepalai perempuan	femalehh	502	0.126	0.044	0.009	0.27
RT memiliki rumah sendiri	rumah	502	0.668	0.137	0.22	0.991
Lokasi desa di P. Jawa (1=Ya; 0 = Tidak)	Dummy Jawa	502	0.434	0.496	0	1

Sumber : Perhitungan penulis dari olahan data PODES dan SUSENAS 2011.

¹⁶ Variabel ini dipilih sebagai proksi karena merujuk kepada konsep disorganisasi sosial, kriminalitas berawal dari pertarungan antar norma. Satu hal lagi variabel CE ini juga harus memperhitungkan heterogenitas etnis.

massalnya dapat diselesaikan oleh tokoh agama maka dianggap bahwa kabupaten/kota itu relatif memiliki level CE yang semakin baik.

Adapun hasil pengukuran data variabel sosial-ekonomi komunitas desa yang telah diaggregasi pada level kabupaten/kota disajikan dalam bentuk tabel 1 seperti berikut ini.

3. Strategi Estimasi

Untuk menganalisis hubungan antara struktur sosial-ekonomi lingkungan seperti ketimpangan pendapatan terhadap pembentukan CE maka akan digunakan model regresi OLS. Untuk itu, penelitian ini akan merujuk kepada model ekonometrika yang dipergunakan Alesina (2000). Estimasi level pengaruh ini dilakukan dengan *generate score* tertimbang setiap variabel level desa kepada level kabupaten/kota melalui persamaan OLS dalam persamaan (2) sebagai berikut:

$$CE_{iv} = \alpha_0 + \lambda X_{iv} + \theta H_{iv} + \delta G_v + v_{iv} \dots \dots \dots (2)$$

Semua variabel, kecuali G, *diaggregate* dari level desa ke level kabupaten/kota dengan melakukan pembobotan terhadap 2 kondisi yaitu jumlah penduduk dan jumlah desa pada setiap kabupaten/kota. Dalam hal ini dianggap bahwa variasi level “kualitas” CE tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh informal pada suatu kabupaten/kota dapat diukur secara riil dengan mempertimbangkan variasi jumlah penduduk desa pada level kota/kab itu. Kemudian karena aggregasi dilakukan pada level kabupaten/kota maka dengan sendirinya variasi jumlah desa pada setiap kabupaten/kota turut menentukan kualitas CE pada setiap daerah tadi.

Variabel kinerja CE ini digunakan karena pertimbangan dua hal. Pertama, karena kita tidak memiliki data kuantitas (jumlah nominal) tokoh agama pada setiap desa secara eksplisit. Kedua, karena unit analisis adalah level kabupaten/kota, hal ini juga akan menghindari bias penilaian terkait jumlah desa. Dengan menggunakan variabel ini, maka kita bisa menilai secara adil karena kabupaten/kota yang dengan jumlah desa lebih banyak akan memiliki level

CE sama dengan kabupaten/kota yang memiliki jumlah desa lebih sedikit, jika tokoh agama pada setiap desa itu mampu menyelesaikan kasus perkelahian masal.

Variabel X_{iv} adalah vector dari karakteristik fasilitas sosial dan umum di kota/kab V yang *diaggregate* dari rerata per desa i , meliputi ketersediaan lembaga sosial dan kemasyarakatan yang aktif berkegiatan. Sementara itu H_{iv} adalah vector dari karakteristik demografi di kota/kab V yang *diaggregate* dari rerata per desa i , meliputi rasio jumlah anak berusia sekolah, rasio rumah tangga yang dikepalai perempuan. Sementara itu G_v adalah variabel ekonomi pada level kabupaten seperti indeks gini di kota/kab dan *mean income*.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian berikut merupakan bagian analisis yang terdiri dari dua bagian, yaitu analisis *univariate* dan analisis *multivariate*.

A. Analisis Univariate

Analisis di awali dengan analisis *univariate* yang membahas besaran dan perbedaan dampak peranan masing-masing tokoh dalam mengatasi perkelahian massal di komunitas (desa/kelurahan).

Interpretasi dari tabel 1 dan 2 pada lampiran 1, menunjukkan bahwa level pengaruh CE yang dihasilkan dari kolaborasi (kehadiran) tokoh-tokoh informal, yaitu dari tokoh agama ataupun tokoh masyarakat secara bersamaan, berbeda secara signifikan dengan level CE yang dimiliki hanya oleh salah satu tokoh saja, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Jadi, dalam hal ini kehadiran kedua tokoh ini di dalam satu kabupaten/kota menjadikan kabupaten/kota tadi memiliki level CE yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain.

Tabel 2: Korelasi Antara Variabel

	CE1	gini	ginisq	etnik	polarisasi	gini2010	ginipolar	lemsos	lemasy	skhrate	urbrate	rumah	femalehh
CE1	1.0000												
gini	-0.0966	1.0000											
ginisq	-0.0799	0.9956	1.0000										
etnik	-0.2255	0.3178	0.3044	1.0000									
polarisasi	-0.0622	0.6885	0.6781	0.2515	1.0000								
gini2010	0.0347	0.4626	0.4661	0.4034	0.2776	1.0000							
ginipolar	-0.0767	0.8663	0.8639	0.2966	0.9511	0.3858	1.0000						
lemsos	0.3147	-0.0327	-0.0223	-0.2767	0.0208	-0.0989	0.0013	1.0000					
lemasy	0.1638	-0.0894	-0.0879	-0.3809	-0.0029	-0.1852	-0.0381	0.3015	1.0000				
skhrate	0.1810	-0.0988	-0.0869	-0.1183	-0.1944	0.1113	-0.1613	0.0512	-0.0968	1.0000			
urbrate	-0.1347	0.3380	0.3285	0.6168	0.1789	0.4313	0.2554	-0.1793	-0.2273	-0.2867	1.0000		
rumah	-0.1265	0.2289	0.2237	0.7753	0.1758	0.2850	0.2123	-0.1933	-0.2384	-0.0732	0.5533	1.0000	
femalehh	0.0051	-0.0510	-0.0448	-0.0020	0.0608	-0.0652	0.0284	0.0302	0.1231	-0.1925	0.1138	0.0685	1.0000

Sumber: Data diolah
CE1=(toga)

Sebagai perbandingan, ketika dibandingkan *mean* (rerata) level CE dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan tokoh informal pada level kabupaten/kota, maka agaknya level pengaruh tokoh informal lebih didominasi oleh kontribusi level CE dari tokoh agama. Hal ini terlihat dari rasio *mean* level CE3 (tokoh informal) terhadap tokoh masyarakat (CE2) yang hampir 8 kali lipat (lihat tabel 2). Sementara itu, rasio *mean* CE3 (tokoh informal) terhadap tokoh agama (CE1), hanya sebesar 1,1 kali lipat.

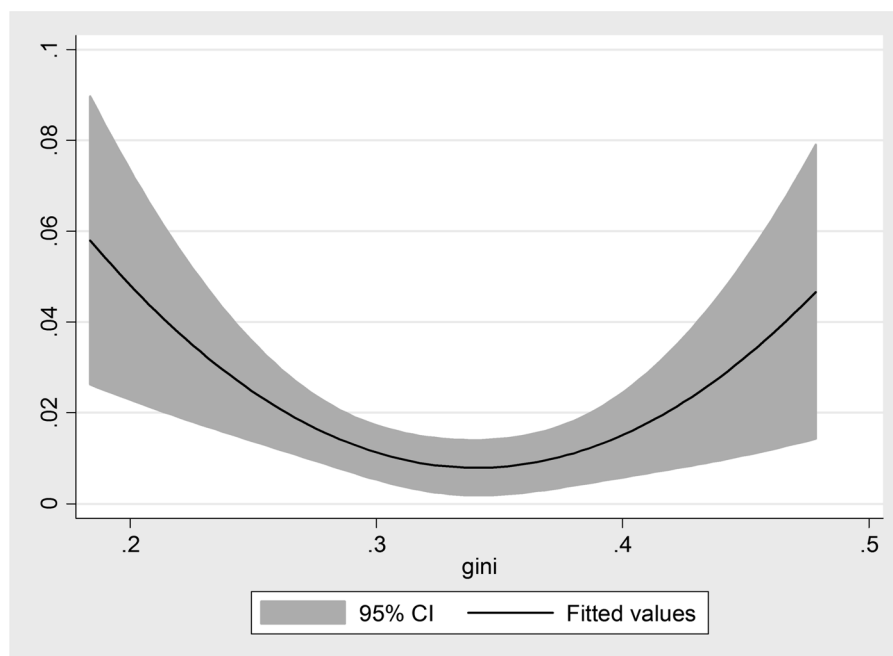
Hal ini juga bisa dikonfirmasi dari tabel 3. Tabel 3 memperlihatkan bahwa rerata level pengaruh CE yang terkait tokoh agama berbeda secara signifikan dengan rerata level CE terkait tokoh masyarakat pada level kabupaten/kota. Dalam hal ini, rerata level CE pada kabupaten/kota terkait tokoh agama lebih besar daripada level CE terkait tokoh masyarakat yaitu hampir sebesar 7 kali lipat. Namun sekali lagi, bukan berarti bahwa komunitas tidak memerlukan tokoh masyarakat (toma). Interpretasi ini harus dipahami sebagai kondisi *eksisting* bahwa dengan dominan populasi muslim, setidaknya fungsi dan kedudukan tokoh agama memang masih layak untuk dipertimbangkan dan dikembangkan sebagai *partner* pemerintah dalam mengatasi permasalahan anti-sosial pada level kabupaten/kota.

Dalam organisasi pemimpin informal ada di samping pemimpin formal dengan otoritas. Dimana pemimpin formal menggunakan kekuasaan dan kewenangan untuk mencapai tujuan mereka, pemimpin informal menggunakan pengaruhnya. Dengan demikian metode kepemimpinan berbeda secara substansial antara pemimpin formal dan informal. Efektivitas pemimpin informal dalam organisasi tampaknya terletak pada kemampuan mereka untuk terampil menggunakan jaringan sosial (La Fasto, 2001).

Selanjutnya hasil analisis ekonometrika model statis disajikan pada lampiran 2 tabel 4. Kolom (1), (2) dan (3) secara berturut-turut merupakan regresi OLS dasar dengan menggunakan total sampel, dengan mengestimasi level CE yang diprosikan masing-masing oleh toga, toma dan tokoh informal. Regresi dari model (1) dan (3) memberikan kesimpulan bahwa ternyata relasi antara level CE dengan ketimpangan *income* berpola huruf U (*U-shape*), pada awalnya relasi ketimpangan dengan level CE adalah negatif yang kemudian pada satu titik (gini indeks) tertentu, pola relasi kedua variabel ini berubah menjadi positif.

Hal ini seakan menyiratkan bahwa pada satu kondisi, ketimpangan yang membesar akan menjadikan

Grafik 1. Relasi kualitas pengaruh tokoh agama (level CE1) dengan Ketimpangan (Gini indeks)



Sumber : Perhitungan penulis dari data diolah

B. Analisis Multivariate

1. Struktur Sosial-ekonomi dan Kualitas Pengaruh Tokoh Informal (Level CE)

Kepemimpinan Informal terjadi tanpa kekuasaan atau otoritas organisasi pendukungnya.

masyarakat bergerak mencari identitas bersama (polarisasi). Di sinilah sebenarnya, *social capital* ibarat pisau bermata dua. *Social capital* bisa diarahkan menuju manfaat yang positif namun bisa pula disalahgunakan untuk tujuan "negatif" (Lin, 2011). Terutama ketika kondisi sosial-ekonomi seperti kemiskinan

dan ketimpangan dalam suatu komunitas pada masa sebelumnya cukup tinggi, maka *bonding social capital* yang kuat, bukannya meredam ketimpangan tadi namun justru dapat mereproduksi (divergensi) kemiskinan¹⁷ dan ketimpangan (Mogues, 2005).

Sementara itu, relasi heterogeneitas etnis dengan level CE adalah negatif signifikan. Hal ini berarti semakin besar rasio desa yang didiami oleh lebih dari 2 etnis pada suatu kota/kab maka berpotensi melemahkan kualitas pengaruh tokoh informal (level CE). Terkait hal ini, sebenarnya banyak bukti ambiguitas baik empiris dan teoritis dalam literatur tentang tindakan kolektif dan peran heterogeneities (ketimpangan). Beberapa temuan juga menyepakati keterkaitan efek heterogenitas etnis dan agama dengan aksi kolektif. Sementara itu kebanyakan studi lain juga menemukan korelasi monoton negatif.¹⁸

Di sisi lain, ada juga temuan yang lebih bertentangan terkait pada efek heterogenitas dalam hal kesenjangan ekonomi dan preferensi lingkungan. Temuan dari studi empiris yang berfokus pada heterogenitas kekayaan, menemukan berbagai hubungan negatif signifikan dengan efektivitas tindakan kolektif, seperti (Andersson & Agrawal, 2009), ada juga relasi positif (Wade, 1998), relasi U-shape¹⁹ bahkan relasi U-invers.²⁰ Ambiguitas ini sendiri bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti level unit analisis, metodologi pengukuran dan konstruk variabel serta pemilihan sampel.

Dalam konteks penelitian ini, pola relasi ketimpangan *income* dengan kualitas pengaruh pimpinan informal (level CE) yang berbentuk *U-shape* ini terbukti *robust* minimal pada derajat signifikansi 5%. Terbukti dalam model regresi manapun pada lampiran 2 dan 3, pada tabel 6 dan 7. Pada semua

model regresi (pada semua kolom), arah relasi dan besaran signifikansinya tidak berubah sama sekali. Hanya saja pada beberapa model terutama tabel 7 (model 5 dan 6), signifikansinya sedikit jadi tereduksi, dari 1% menjadi 5%, setelah dimasukkannya berbagai variabel kontrol tambahan ke dalam model.

Kita juga bisa melihat peran kekuatan polarisasi dalam relasinya yang positif dengan level CE, walaupun tidak signifikan. Ketimpangan dan polarisasi merupakan dua ukuran yang berbeda dari masyarakat, baik dalam teori dan praktek (Esteban, 2008). Masyarakat menjadi terpolarisasi dalam kelompok tidak semata-mata karena ketimpangan pendapatan, akan tetapi juga dipicu oleh faktor-faktor lain. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa ketimpangan yang berinteraksi dengan polarisasi akan melemahkan level CE dan menjadi pemicu konflik ketika masyarakat terbelah menjadi dua kelompok berukuran sama.²¹

Selanjutnya dengan memasukkan variabel kontrol lainnya pada kolom (4), (5) dan (6), pembacaan hasil regresi menunjukkan bahwa proporsi anak usia sekolah (5-15 tahun) ternyata berkontribusi (secara tidak langsung) terhadap variasi level CE. Relasi antara rasio jumlah anak usia sekolah dengan level CE adalah positif signifikan. Dengan asumsi bahwa orang tua turut terlibat dalam proses pendidikan anak, baik di sekolah formal maupun non-formal²², maka interaksi antar orang tua-anak dan orang tua-guru, orang tua lainnya serta dengan para pemimpin informal akan membentuk ikatan *social capital* sampai kepada kemauan untuk terlibat dalam kontrol sosial terhadap anak-anak.

Kemudian keberadaan organisasi sosial baik secara formal maupun non-formal, berkontribusi menentukan level CE komunitas daerah. Hal ini terlihat dari positif signifikannya dampak keberadaan lembaga sosial terhadap level CE. Semakin besar rasio jumlah lembaga sosial yang aktif pada sebuah kabupaten/kota maka akan semakin tinggi level CE. Hal ini sesuai dengan konsep dasar *social capital* yang mensyaratkan adanya jaringan (*networking*) antar individu yang dilandasi oleh rasa saling percaya yang resiprokal antar mereka.

¹⁷ Dalam papernya, Cleaver menyatakan bahawa pengalaman orang-orang pada kluster termiskin dari kelompok yang kurang beruntung kondisi sosial-ekonominya, bisa jadi membuat mereka (sangat mungkin) tidak dapat menarik manfaat modal sosial untuk memperbaiki kemiskinan, atau meningkatkan asosiasi dan partisipasi di level komunitas. Oleh karenanya, hubungan sosial, tindakan kolektif, dan lembaga lokal dapat secara struktural mereproduksi kemiskinan itu sendiri.

¹⁸ James Habyarimana, Macartan Humphreys, Daniel N. Posner, & Jeremy M. Weinstein, "Why does ethnic diversity undermine public goods provision?", *American Political Science Review* Vol. 101 No. 4, November 2007, pp. 709-725.

¹⁹ Pranab Bardhan, P., & Jeff Dayton-Johnson, *Inequality and the governance of water resources in Mexico and South India*, 2002 In Jean-Marie Baland, Pranab Bardhan, & Samuel Bowles (eds.), *Inequality, Cooperation, and Environmental Sustainability*, New York: Russell Sage Foundation, 2006.

²⁰ Sirisha C. Naidu, "Heterogeneity and collective management: Evidence from common forests in Himachal Pradesh, India", *World Development* 37(3), 2009, pp. 676-686.

²¹ Indra, "Konflik Sosial di Indonesia : Peranan Ketimpangan dan Polarisasi", Disertasi Doktoral tidak dipublikasikan, Depok: Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2015

²² Dalam hal ini, peningkatan jumlah sekolah formal-non formal berbasis agama (sekolah islam semisal TK, SDIT dan pesantren) bisa jadi turut berkontribusi. Jika diasumsikan sekolah ini melibatkan peran orang tua secara aktif dalam proses pendidikannya maka secara tidak langsung, lembaga pendidikan ini menjadi transmisi penguatan kualitas pengaruh para pemimpin agama. Namun, tentu saja dugaan ini perlu pengkajian tersendiri dan mendalam untuk memuktikannya.

Sebaliknya, temuan mengejutkan ternyata dampak keberadaan lembaga kemasyarakatan (ormas) malah menurunkan level CE yang diinisiasi melalui peran tokoh masyarakat (toma). Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar dan cukup membingungkan, kenapa hal ini bisa terjadi?. Merujuk kepada defenisi ormas dalam pertanyaan r804 kuisisioner PODES BPS, ormas didefenisikan berbasis legal-formal atau merujuk kepada aturan UU, yang mengkategorikan lembaga semisal ICMI, Muhammadiyah, Kowani, MKGR dan semacamnya sebagai ormas. Tentu saja lembaga berstruktur *top-down* seperti ini memiliki sifat dan mekanisme jauh berbeda dengan lembaga yang diinisiasi oleh warga (*bottom-up*)²³ pada level komunitas itu sendiri²⁴.

Sementara itu, pada komunitas di daerah perkotaan, interaksi sosial yang tidak intens dan lemah antara para penyewa/pengontrak (*residential instability/high residential mobility*) karena seringkali berpindah dengan warga lainnya, menghambat proses adopsi norma dan penegakan kontrol sosial (Pratt and Cullens, 2005). Hal ini terlihat dari relasi variabel rumah dengan level CE pada kolom (4) dan (6) yang negatif walaupun tidak signifikan. Mungkin saja etnis yang berbeda sebagai mayoritas penghuni (pengontrak) rumah tadi memiliki standar moral tinggi, namun hambatan (*constraint*) interaksi memaksa mereka tidak terlibat dalam kegiatan penegakan norma sosial.

Tidak lupa, tingkat kerentanan keluarga yang tinggi, yang diproksikan oleh proporsi rumah tangga yang dikepalai perempuan (*female*), juga memperlemah kualitas pengaruh tokoh informal (level CE). Menurut teori disorganisasi sosial, pola ini muncul dari beban orangtua tunggal, yang mengganggu kemampuan orang tua untuk bekerja sama dan sebagai konsekuensinya akan mengurangi jumlah orang dewasa yang terlibat dalam pengawasan bersama anak-anak. Lebih jauh dalam studi kriminologi, hubungan antara kerentanan keluarga dan dampak dari tidak terbangunnya CE

²³ Namun uniknyanya, regresi tersendiri yang dilakukan dengan menjadikan kualitas tokoh masyarakat sebagai proksi menggantikan tokoh informal, menunjukkan hubungan yang positif signifikan dengan level CE. Agaknya secara tidak langsung hal ini menunjukkan perbedaan habitat dan transmisi jalur pengaruh tokoh agama dengan tokoh masyarakat. Hal ini sekaligus bisa menjadi masukan bagi BPS dalam memberikan kandidat yang lebih pas sebagai bentuk organisasi kemasyarakatan yang bersifat *bottom-up*.

²⁴ Kemudian untuk selanjutnya, karena besarnya peranan tokoh agama (toma) dalam konstruk CE ini dan tidak relevannya peran tokoh masyarakat (toma), maka pada bagian selanjutnya pembahasan selanjutnya hanya dibatasi pada peran tokoh agama.

pada level komunitas, salah satunya yaitu tingkat penangkapan remaja, cenderung berkorelasi kuat secara positif.

2. Robustness Test

Bagian ini akan mencoba menguji keajegan (*robust*) pola dan signifikansi relasi antara karakteristik sosial-ekonomi dengan level CE komunitas. Apakah pola dan relasi yang ditemukan pada model OLS akan tetap atau berubah pada situasi dan kondisi tertentu. Untuk itu, *robustness test* dilakukan dengan mengintroduksi aspek regional, membagi data awal ke dalam dua region, yaitu Jawa-Luar Jawa dan aspek kemakmuran ekonomi (*affluent*), membagi data awal ke dalam dua level kemakmuran, yaitu Kaya-Miskin. Jika ternyata, pola dan signifikansi relasi antar variabel utama, ternyata tidak berubah maka berarti model estimasi yang digunakan telah ajeg. Bagi pengambil keputusan di level makro (nasional), model yang terbukti keajegannya merupakan sebuah keniscayaan.

Variasi Jawa-Luar Jawa

Selanjutnya bagian ini, akan melihat peranan *dummy* variabel jawa-luar jawa. Dalam regresi pada lampiran 3 tabel 7, pada kolom (2), terlihat bahwa relasi antara variabel *dummy* jawa dengan level CE, adalah negatif signifikan. Ternyata justru kabupaten/kota di luar pulau Jawa memiliki CE relatif lebih besar dibandingkan *partnert*-nya di pulau Jawa. Setidaknya hal ini dijelaskan oleh fakta bahwa daerah jawa memiliki rasio populasi yang relatif lebih banyak daripada daerah di luar pulau jawa. Kepadatan penduduk ini menyebabkan renggangnya ikatan sosial (sunyi di tengah keramaian). Namun relasi ini tidak *robust*, terbukti dalam model pada kolom (6), signifikansi relasi negatif antara *dummy* jawa dengan level CE tadi direduksi oleh berbagai variabel kontrol tambahan yang digunakan di dalam model.

Temuan lain yang cukup menarik dalam konteks ini adalah perubahan arah (tanda) relasi dari proporsi populasi yang tinggal di daerah perkotaan dengan level CE. Dalam persamaan *regresi basic* (lampiran 2) pada kolom (1) dan (2), proporsi populasi *urban* mempengaruhi level CE secara positif walaupun tidak signifikan. Namun dalam konteks Jawa-luar jawa, relasinya menjadi negatif dan tetap tidak signifikan. Agaknya, daerah dengan proporsi *rural* yang semakin besar di pulau Jawa cukup berpengaruh dalam menentukan level CE. Hal ini menjadi sebuah pemikiran menarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana struktur sosial-ekonomi yang ada pada daerah *rural* dapat memberi variasi positif pada pembentukan level CE.

3. Variasi Kaya-Miskin

Bagi penduduk dalam lingkungan yang relatif makmur, yang menikmati pekerjaan formal, pendapatan yang baik, dan cukup waktu dan sumber daya untuk mengatasi masalah-masalah lokal (misalnya, kenakalan), bauran ikatan yang kuat dan lemah akan saling memberdayakan. Ikatan yang kuat memungkinkan warga tersebut untuk mencapai konsensus tentang masalah bersama, menyepakati solusi yang menjanjikan, dan bekerja secara kolektif untuk mencoba solusi tersebut. Ikatan lemah dengan lingkungan luar memungkinkan mereka untuk memperkenalkan solusi inovatif dengan memberikan ide-ide segar dan informasi.

Sebaliknya dalam lingkungan yang kurang beruntung, tingginya tingkat mobilitas perumahan (*residential mobility*), kemiskinan, dan kurangnya waktu dan sumber daya melemahkan kemampuan mereka untuk mencapai konsensus tentang pengendalian kriminalitas diluar jaringan kekerabatan, mengidentifikasi cara baru mengendalikan kriminalitas, keterkaitan dengan instansi lain dan bertindak secara kolektif. Selain itu, di lingkungan seperti itu, pemuda yang kurang beruntung, yang memiliki tingkat *drop-out* (DO) sekolah yang tinggi dan pasar tenaga kerja yang suram, memiliki insentif yang kuat untuk mengembangkan cara-cara alternatif untuk mendapatkan status, mungkin dengan cara yang cenderung melanggar aturan sosial.

Hal ini dapat dibuktikan dari pembacaan hasil regresi pada lampiran 3 tabel 7, kolom (3) dan (6) menunjukkan relasi positif signifikan antara rerata (*mean*) pengeluaran rumah tangga dengan level CE. Semakin tinggi rerata pengeluaran rumah tangga pada suatu kota/kab maka semakin besar level CE. Relasi ini terbukti cukup *robust* pada derajat signifikansi 10%. Terbukti dalam model pada kolom (6), arah relasi antara *dummy* kaya dengan level CE tidak berubah. Hanya saja, signifikansinya jadi tereduksi, dari 5% menjadi 10%, dengan dimasukkan berbagai variabel kontrol tambahan ke dalam model.

III. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Simpulan utama dari makalah ini adalah bahwa ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks gini, memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kualitas pengaruh tokoh informal agama (toga) (konstruk CE). Dalam proses hingga tiba pada simpulan ini, kami menemukan hasil yang menarik lainnya. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. *Pertama*, relasi antara level CE dengan ketimpangan *income* berpola huruf U (*U-shape*). Dengan kata lain, pada awalnya relasi ketimpangan dengan level

CE adalah negatif yang kemudian pada satu titik (gini indeks) tertentu, pola relasi kedua variabel ini berubah menjadi positif. *Kedua*, struktur, situasi dan kondisi (konteks) sosial-ekonomi lainnya juga ternyata berperan signifikan dalam menentukan kualitas pengaruh tokoh agama. Atau secara tidak langsung menggunakan analisis kontradiktif, penyebab sebuah konflik dapat diselesaikan oleh tokoh informal ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan selama ini. Untuk memahami dinamika konflik internal banyak indikator tertentu perlu diperhitungkan, seperti kemiskinan dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, kelangkaan sumber daya, diskriminasi dan ketidakberdayaan kaum minoritas dan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Bauran variabel-variabel ini bisa, tetapi harus tidak selalu, menyebabkan stres sosial, kekerasan dan perang.

Oleh karenanya sangat penting untuk membedakan antara penyebab struktural dari konflik dan penyebab proksimat yang memicu eskalasi konflik. Hal ini menjadi alasan mengapa pencegahan konflik saat ini harus membedakan antara pencegahan jangka pendek dan struktural. Penyebab struktural terutama meliputi faktor yang berhubungan dengan kelemahan, kemiskinan, ketidakadilan politik dan kesulitan ekonomi. Dengan demikian, pencegahan struktural harus memiliki dimensi ekonomi, kebutuhan manusia yang kuat dan pemerintahan bias, dan harus terdiri bantuan pembangunan, peningkatan kapasitas lokal, dan bantuan dalam pemilihan dan hak asasi manusia pemantauan.

Paper ini menunjukkan bahwa dorongan melakukan *collective action* bisa datang dari pemimpin teladan yang oleh karena pengorbanan pribadi, komitmen yang kuat akan menarik dan menjadi pemberi motivasi dan sanksi bagi orang lain untuk mengikutinya. Dalam hal ini, tokoh agama dan tokoh masyarakat memperoleh pengaruh CE dari sumber lokal berupa ketersediaan lembaga sosial dan juga struktur demografi komunitasnya. Selain itu, keberadaan lembaga sosial ini pada gilirannya diharapkan sekaligus akan menjadi "kawah candra dimuka", tempat penggemblengan bagi proses pembentukan *social capital* warganya, terutama jika diinteraksikan dengan rasio jumlah anak yang besar.

B. Saran

Paper ini memiliki beberapa kekurangan penting yang harus dijawab di dalam berbagai penelitian lanjutan. *Pertama*, eksplorasi sumber pembentuk atau konstruk variabel CE masih sangat terbatas. Paper ini hanya mengambil proksi keberhasilan memediasi perkelahian massal oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai CE. Hal ini tentu

memerlukan klarifikasi lanjutan untuk meyakini bahwa memang hal ini valid mewakili level CE. Kedua, relasi level pengaruh tokoh atau CE dengan indeks gini yang berupa pola *U* menyisakan pertanyaan menarik tentang variabel intermediasi yang menjadi penyebabnya. Apa sebenarnya dan melalui mekanisme apa yang menyebabkan terjadinya *marginal decreasing* dampak ketimpangan terhadap kualitas pengaruh tokoh agama ini?

Ketidakpastian tentang mekanisme ini menimbulkan berbagai pertanyaan dengan implikasi kebijakan yang penting. Hal ini merupakan satu informasi penting yang bisa menjadi instrumen kebijakan pengurangan kriminalitas yang dapat diintervensi pemerintah. Kemudian juga secara metodologi, sebagaimana lazimnya penelitian bertema sosial, maka hasil estimasi regresi di dalam berbagai model pada paper ini, dicurigai masih mengandung berbagai persoalan endogenitas. Dalam memahami pola dan proses kausalitas, mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat, dalam lingkup fenomena sosial sehingga estimasi terbebas dari berbagai bias maka ketelitian dan jam terbang amat menentukan. Untuk itu, pemecahan masalah ini melalui penggunaan metode 2-SLS atau IV, sangat disarankan kepada penelitian selanjutnya.

Dari hal itu, diharapkan dapat menjawab pertanyaan tentang seberapa penting pencegahan kegiatan anti-sosial, seperti kenakalan remaja, perkelahian pemuda bahkan termasuk kriminalitas melalui program penguatan tokoh informal dalam komunitas dalam masa-masa ekstrim, semisal ketimpangan *income* yang semakin meninggi? Sampai sejauh mana otoritas publik harus peduli dengan pendapatan dan polarisasi kelas? Apakah kebijakan yang mempromosikan pengembangan lembaga sosial sebagai sumber pembentuk pengaruh ulama tadi dapat akan dapat dikelola dengan baik merujuk kepada struktur sosial ekonomi komunitas itu sendiri?. Semoga paper kecil dan sederhana ini akan membantu membangkitkan minat pada isu dan bisa menjawab sebagian pertanyaan terkait pencegahan kriminalitas berbasis komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahn, Toh-Kyeong, and Elinor Ostrom. (2008). *Social Capital and Collective Action in The Handbook of Social Capital*, edited by Dario Castiglione, Jan Van Deth, and Guglielmo Wolleb. New York: Oxford University Press.
- Bardhan, P., & Dayton-Johnson, J. (2007). *Inequality and the governance of water resources in Mexico and South India*. In Baland, J.-M., Bardhan, P., & Bowles, S. (eds.) *Inequality, Cooperation, and Environmental Sustainability*. New York: Russell Sage Foundation.
- Blau, P.M. (1977). *Inequality and Heterogeneity: A Primitive Theory of Social Structure*. New York, NY: Free Press.
- Greene, W. H. (2003). *Econometric Analysis* (Fifth ed.). New York: Prentice-Hall.
- Habyarimana, J., Humphreys, M., Posner, D.N., & Weinstein, J.M. (2009). *Coethnicity: Diversity and the dilemmas of collective action*. New York: Russell Sage Foundation.
- Lin, Nan. (2001). *Building a network theory of social capital* in N. Lin, K. Cook et al. (eds.) *Social Capital. Theory and Research*, New York: Walter de Gruyter.
- Olson, Mancur (1965), *The Logic of Collective Action: Public Goods and The Theory of Groups*, Cambridge, MA : Harvard University Press.
- Shaw, Clifford R., and McKay, Henry D. (1972). *Juvenile delinquency and urban areas*. Chicago: Univ. of Chicago Press.
- Chong, Denis. (1991). *Collective Action and The Civil Right Movement*. Chicago: University of Chicago Press.

Artikel dalam Jurnal

- Alesina, A. and La Ferrara, E., (2000). Participation in Heterogeneous Communities, *Quarterly Journal of Economics* 115(3), pp. 847-904.
- Bergstrom, T., Blume, Lawrence and Varian, Hal (1986), On The Private Provision of The Public Goods, *Journal of Public Economics*, Vol.29 , pp. 25-49.
- Cleaver, Frances (2005), The inequality of social capital and the reproduction of chronic poverty, *World Development*, Vol. 33, Issue 6, pp. 893-906.

- Dijk, Frans van and Winden, Frans van. (1997). Dynamics of Social Ties and Local Public Good Provision. *Journal of Public Economics*, vol. 64, 323– 341.
- Erlich, I. (1973). Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation. *Journal of Political Economy*, v. 81, p. 521-565.
- Gachter, S., & Fehr, E. (1999). Collective Action as a Social Exchange. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 39, 341-369.
- Glaeser, E. L., Laibson, D., & Sacerdote, B. (2002). An Economic Approach to Social Capital. *The Economic Journal*, 112 (483), F437-F458.
- Habyarimana, J., Humphreys, M., Posner, D.N., & Weinstein, J. M. (2007). Why does ethnic diversity undermine public goods provision? *American Political Science Review* 101: 709-725.
- La Ferrara, E. (2002). Inequality and Participation: Theory and Evidence from Rural Tanzania. *Journal of Public Economics*, vol. 85(2), pages 235-273.
- Mogues, Tewodaj, and Carter, Michael R. (2005), Social capital and the reproduction of economic inequality in polarized societie, *The Journal of Economic Inequality*, Volume 3, Issue 3, pp 193-219.
- Naidu, S.e. (2009). Heterogeneity and collective management: Evidence from common forests in Himachal Pradesh, India. *World Development* 37(3): 676-686.
- Narayan, Deepa, and Lant Pritchett. (1999). Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania. *Economic Development and Cultural Change* 47:871-97.
- Ostrom, Elinor (2000), Collective Actions and The Evolution of Social Norms, *Journal of Economics Perspectives*, Vol. 14 No. 3, pp. 137-158.
- Sampson, R. J., and Groves, W.B. (1989). Community structure and crime: Testing social-disorganization theory. *American Journal of Sociology* 94(4):774–802.

Disertasi

- Halimatussadiyah, Alin. (2013). “Social Capital to Streghten Collective Environmental Action in Indonesia”, Disertasi Doktorat tidak dipublikasikan, Depok: Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Indra. (2015). “Konflik Sosial di Indonesia: Peranan Ketimpangan dan Polarisasi”, Disertasi Doktorat tidak dipublikasikan, Depok: Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.